

Harmoni Pendidikan Islam Nusantara
(Studi Resolusi Konflik Keagamaan di Kabupaten Nganjuk)

Mukhamat Saini

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Nglawak Kertosono Nganjuk

Email: *sainimuhammad85@gmail.com*

Abstrak

Konflik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Nganjuk berawal dari perbedaan tentang aqidah. Misalnya, pada tahun 2017 adanya penyebab konflik antara Islam mainstream dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur bermula dari aspek teologis. Kemudian, berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, eksklusivitas tidak ada tokoh pemersatu dari kedua belah pihak. Persoalannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat tetap menjadikan aksi damai sebagai opsi utama mereka dalam merespon berbagai isu konflik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Studi ini juga memperlihatkan temuan menarik menyangkut perkembangan konflik keagamaan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk. Kedua, untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan Islam Nusantara, dalam mewujudkan resolusi konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk. Ketiga, untuk mengevaluasi, menganalisis dan merubah arah sosial keagamaan di Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-fenomenologis. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah prosedur interview, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian sumber data primer penelitian ini adalah: (1). Para pimpinan Ormas Keagamaan (Ketua PC Nahdlatul 'Ulama, Ketua PC Muhammadiyah, Ketua PC HTI, Ketua PC Jama'ah Tabligh dan Ketua PC LDII Kabupaten Nganjuk); (2)

Sejumlah Warga; (3). Serta sejumlah tokoh masyarakat sekitar Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian ini adalah pertama, Jumlah insiden kekerasan sebanyak 35,4%, didominasi oleh orang/ kelompok orang tidak dikenal. Adapun kelompok keagamaan terlihat mendominasi 10,6% insiden kekerasan keagamaan. Sisanya, pelaku kekerasan melibatkan kelompok pemuda/ perguruan pencak silat (2,6%), kelompok kemasyarakatan (2,2%), aparat keamanan (1,1%) dan kader partai politik (0,4%). Kedua, ormas Islam Kabupaten Nganjuk butuh pendampingan dalam menyatukan persepsi tentang keberadaan Islam Nusantara dan pengendalian potensi konflik keagamaan di kota Nganjuk yang masih belum tergal dengan maksimal. Ketiga, pentingnya peran pemangku kebijakan yaitu Ormas/ pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang harmoni itu yang menjadi tolak ukur. Karena, harus disadari bahwa keberagaman masyarakat Kabupaten Nganjuk itu sangat kompleks dan bervariasi.

Kata kunci: *Resolusi Konflik Keagamaan, Harmoni Pendidikan Islam Nusantara, Kabupaten Nganjuk*

A. Pendahuluan

Lahirnya wacana Islam Nusantara tak terlepas dari efek kekerasan yang mengatasnamakan Islam yang beberapa dasawarsa ini melanda dunia internasional. Sebut saja, sejumlah pemboman dan pembunuhan yang berdalih membela Islam, muncul pemberontakan radikal Islam di beberapa negara dan terakhir muncul ke permukaan kejajaman ISIS yang dengan kancang memproklamkan Negara Islam.

Azyumardi Azra, seorang intelektual Muslim ternama mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah nama yang baru muncul, Islam Nusantara mengacu kepada gugusan kepulauan yang mencakup Malaysia, Pattani Thailand, Moro Filipina, Singapura dan Brunai, atau sering juga disebut Islam Asia Tenggara.¹

¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2002.

Menurut Azyumardi Azra, seperti yang dikutip dari beberapa sumber terpercaya, menyebutkan doktrin Tauhid Islam Nusantara tidak berbeda dengan mayoritas Muslim ahlusunnah wal jamaah di dunia, meyakini doktrin Rukun Iman dan Rukun Islam secara utuh. Namun, pada sebagian praktek ibadah, dipengaruhi kebudayaan lokal, dan tasawuf seperti perayaan maulid nabi, walimatul ars, tahlilan dan lainnya. Singkatnya, Islam Nusantara sangat terpengaruh sejumlah tokoh pemikir Islam pertengahan. Seperti pemikiran kalam (teologi) Asy'ariyah, fiqh Syafi'i, tasawuf sunni al-Ghazali, dan praktek tokoh sufi seperti Abdul Qodir Jailani.

Sejalan dengan proses penyebaran Islam di Indonesia, pendidikan Islam mulai tumbuh, meskipun masih bersifat individual. Kemudian, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga masjid, surau, dan langgar, mulailah secara bertahap dilangsungkan pengajian umum mengenai tulis baca Al-Qur'an dan wawasan keagamaan.² Bentuk yang paling mendasar dari bentuk pendidikan ini umumnya disebut pengajian Al-Qur'an.³ Selain itu, ada lembaga pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, atau ulama. Di lembaga inilah calon guru agama, calon kiai, atau calon ulama dididik. Mereka yang telah keluar dari pesantren kemudian menuju ke kampung masing-masing. Tidak jarang pula para raja atau kaum bangsawan mengundang para kiai atau ulama yang diangkat sebagai guru agama bagi keluarganya. Banyak juga kiai yang diangkat menjadi penasihat kerajaan, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memberikan pengaruh di bidang politik kepada raja-raja.

Bentuk bangunan pada masjid kuno di Indonesia yang mengadaptasi pola-pola bangunan atau keyakinan Hindu tersebut menunjukkan bahwa Islam disebarkan dengan jalan damai. Selain itu, secara kejiwaan dan strategi dakwah, penerusan tradisi seni bangunan dan seni ukir pra-Islam merupakan alat Islamisasi yang sangat bijaksana sehingga bisa menarik orang-orang non-Islam untuk memeluk Islam sebagai pedoman hidup barunya.⁴

² Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam: Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 6.

³ Karel A. Streenbrink, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia* (1596-1942), terj. Suryana A. Jamrah (Bandung: Mizan, 1995), 117.

⁴ *Ibid.*, 193-194.

Kawasan Muslim Indonesia (Nusantara) yang terletak di pinggiran Dunia Islam mempresentasikan salah satu bagian Dunia Islam yang paling sedikit mengalami Arabisasi. Kondisi semacam ini, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri Muslim Asia Tenggara lainnya, Islamisasi berlangsung secara gradual. Dampak dari cara Islamisasi semacam ini adalah bentuk dan keyakinan agama lama diubah secara lambat tanpa harus menghilangkan.⁵ Meskipun demikian, perkembangan Islam di Asia Tenggara tetap berhubungan erat dengan Islam di Timur Tengah.⁶ Ini merupakan kelanjutan dari jalinan perdagangan antara Nusantara dengan dunia internasional yang telah terbentuk begitu mapan di Nusantara.

Secara intelektual, Muslim Asia Tenggara selalu bersifat terbuka dan reseptif terhadap proses Islamisasi yang berlangsung terus-menerus yang merupakan ciri masyarakat itu selama berabad-abad. Sebaliknya, dengan ciri yang sama dengan kaum Muslim lainnya, mereka juga merupakan masyarakat yang mudah terkena perubahan yang mengganggu mereka dari waktu ke waktu.⁷ Fenomena tersebut terjadi karena lokasi kawasan Nusantara merupakan tempat persilangan jaringan lalu lintas laut yang menghubungkan benua Timur dan benua Barat.⁸ Hal ini menyebabkan kepulauan Nusantara banyak disinggahi oleh kapal-kapal pedagang asing, termasuk dari Timur Tengah. Sejak Islam berkembang di Asia Tenggara, dinamika Islam di Timur Tengah mempengaruhi wacana Islam di Dunia-Melayu-Indonesia.

Hubungan yang kuat dan intensif antara kedua wilayah tersebut telah tercipta sejak masa yang paling awal kehadiran Islam di Dunia Melayu-Indonesia. Menurut Azyumardi Azra, hubungan antara kedua wilayah itu hingga paruh kedua abad ke-17 menempuh beberapa fase dan juga mengambil beberapa bentuk. Pada fase pertama (sekitar abad ke-8 sampai abad ke-12), hubungan tersebut lebih bersifat ekonomis,

⁵ Fauzan Saleh, *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in Twentieth Century Indonesia: A Critical Survey* (Leiden, Boston, Koln: Brill, 2001), 1.

⁶ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, 90.

⁷ Omar Faruk, "Muslim Asia Tenggara dari Sejarah menuju Kebangkitan Islam", dalam Saiful Muzani, (ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1993), 23.

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Indonesia Baru, 1500-1900: dari Emporium sampai Imperium, Jilid I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 1.

hubungan ini berbentuk hubungan dagang yang lebih banyak diprakasai oleh orang-orang Islam Timur Tengah, terutama Arab dan Persia.

Fase kedua, yang berlangsung antara abad ke-12 sampai akhir abad ke-15, lebih bercorak keagamaan, selain hubungan ekonomis. Pada fase ini, Muslim Arab dan Persia (pedagang/ pengemban sufi) mulai menintensifkan penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara. Oleh karena itu, pada fase ini, hubungan-hubungan keagamaan dan kultural terjalin lebih erat.⁹

Pada fase ketiga, yaitu sejak abad ke-16 sampai paro kedua abad ke-17, lebih bercorak politis di samping corak keagamaan. Pada masa ini ditandai dengan kedatangan dan peningkatan pertarungan di antara kekuatan Portugis dengan Dinasti Usmani di kawasan Lautan Hindia. Dalam periode ini, umat Islam di Nusantara mengambil banyak inisiatif untuk menjalin hubungan politik dan keagamaan dengan Dinasti Usmani.¹⁰

Selain itu, Muslim di Nusantara mulai berperan aktif dalam dunia perdagangan di lautan Hindia tersebut. Sementara itu, hubungan-hubungan politik dan keagamaan juga mulai dijalin dengan para penguasa Haramayn menjelang paro kedua abad ke-17. Pada fase ini, Muslim Nusantara semakin banyak yang datang ke Tanah Suci, yang pada gilirannya mendorong terciptanya jalinan keilmuan antara Timur Tengah dengan Nusantara melalui ulama-ulama Timur Tengah dan orang-orang Nusantara yang belajar di sana. Mereka ini kemudian dikenal sebagai "murid-murid Jawi"

Murid-murid Jawi di Haramayn merupakan inti utama tradisi intelektual dan keilmuan Islam di antara kaum Muslim Melayu-Indonesia. Di Haramayn, murid-murid Jawi ini membentuk sebuah "perkampungan" yang disebut "koloni Jawi". Kegiatan orang-orang Jawi di daerah koloni tersebut juga mempunyai saham yang cukup besar dalam perkembangan Islam selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas kebanyakan ulama "lulusan" Haramayn dalam menghembuskan angin pembaharuan Isla di

⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1999), 57.

¹⁰ *Ibid*, 58.

Indonesia, seperti Nur al-Din al-Raniri, Syaikh 'Abd al-Rauf al-Sinkili, Muhammad Yusuf al-Makasari, 'Abd al-Shamad al-Palimbani.¹¹

Pembentukan tradisi keulamaan Islam Indonesia dan keilmuan Islam Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan membangkitkan terbentuknya jaringan ulama. Jaringan ulama yang berpusat di Haramayn ini menyebar ke berbagai wilayah Dunia Islam, khususnya kawasan Afrika Utara dan Timur, Arabia Selatan dan Timur, Asia Selatan, Anak Benua India, dan Nusantara.¹²

Pemahaman pertama yang harus dipahami dalam menganalisis resolusi konflik dan anarkisme agama adalah agama tidaklah mengajarkan kekerasan kepada umatnya. Agama justru mengabarkan adanya perdamaian dan cinta kasih baik kepada sesama umat maupun umat lain yang mempunyai keyakinan berbeda. Adanya konflik berbau anarkisme agama sendiri justru dipertanyakan agama karena telah menjadi distorsi dalam ajaran agama tersebut. Agama hanya menjadi identitas artifisial dalam suatu konflik untuk memberikan legitimasi moral untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lainnya. Selain halnya legitimasi moral dan identitas, menyulutnya kekerasan atas nama agama juga disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran ajaran agama sehingga menimbulkan pemahaman sempit dan sikap chauvinistik. Maka dalam konteks ini, konflik anarkisme agama sejatinya tidak ada. Yang ada justru adalah konflik berupa rivalitas sumber ekonomi dan politik maupun persaingan memperebutkan jabatan publik dalam pemerintahan.¹³

Studi sosiologi agama yang mengupas kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan masih dikatakan sedikit. Minimnya studi tersebut dikarenakan banyak di antara kearifan lokal tersebut sudah tergerus oleh modernitas zaman sehingga tema kearifan lokal menjadi tidak menarik dalam perspektif manajemen konflik. Hilangnya kearifan lokal membuat potensi konflik anarkisme agama semakin membesar karena masyarakat tidak memiliki filter kultural dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka.¹⁴ Benturan sosial yang terjadi dalam masyarakat

¹¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1990), 33.

¹² Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, 61.

¹³ S. Rizal Panggabean, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (Jakarta: Asia Foundation, 2009), 7.

¹⁴ Abdur Rozaki, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Flamma, Vol. 24,

multietnik pasca otoritarian memunculkan adanya fenomena stres sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material.

Dalam hal ini, agama dinilai sebagai *faktor disintegrasi*. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah ia hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaan yang lama-lama melahirkan suatu komunitas tersendiri yang berbeda dari komunitas pemeluk agama lain. Rasa perbedaan tadi kian intensif ketika para pemeluk suatu agama telah sampai pada sikap dan keyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama yang dipeluknya. Sedangkan yang lain salah dan kalau perlu dimusuhi.

Pandangan yang kedua adalah sebaliknya. Justru agama berperan sebagai *faktor integrasi*. Katakanlah ketika masyarakat hidup dalam suku-suku dengan sentimen sukuisme yang tinggi, bahkan di sana berlaku hukum rimba, biasanya agama mampu berperan memberikan ikatan baru yang lebih menyeluruh sehingga terkuburlah kepingan-kepingan sentimen lama sumber perpecahan tadi. Agama dengan sistem kepercayaan yang baku, bentuk ritual yang sakral, serta organisasi keagamaan dalam hubungan sosial mempunyai daya ikat yang amat kuat bagi integrasi masyarakat.

Di Jawa Timur, peristiwa konflik bertema sunni-syiah baik yang terjadi di Jember maupun Kabupaten Nganjuk ini sepertinya sebuah kelanjutan mata rantai dari peristiwa serupa yang terjadi di berbagai daerah di tahun-tahun sebelumnya. Sebut saja, mulai dari penyerangan sekelompok massa terhadap para pengikut IJABI yang terjadi di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 23 Desember 2006, insiden penyerangan pesantren YAPI yang berpaham syiah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan laskar Aswaja ada tahun 2010-211 di Bangil Pasuruan dan ketegangan-ketengan berskala kecil yang terjadi Malang. Fenomena ini sungguh sangat menarik, dalam artian meskipun ajaran Syiah ini banyak tersebar di Indonesia dan juga pernah mengalami resistensi di daerah lain seperti di Pandeglang Provinsi Jawa Barat (6/2/2011) dan Temanggung Provinsi

Jawa Tengah (8/2/2011) namun tidak separah dan sebesar di Jawa Timur.¹⁵

Dengan demikian, maka sangatlah wajar bila kemudian muncul asumsi-asumsi konspiratif yang mengitari rentetan letusan konflik bertema Sunni-Syiah di Jawa Timur. Bahwa ada unsur kesengejaan untuk menciptakan dan memelihara konflik Sunni-Syiah yang melibatkan kekuatan transnasional. Pertanyaannya kemudian "Benarkah ada keterlibatan kekuatan transnasional di balik konflik bertema Sunni-Syiah ini serta Mengapa percepatan dan penguatan konflik berada di Jawa Timur?".

Konflik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Nganjuk berawal dari perbedaan tentang aqidah. Misalnya, pada tahun 2017 adanya penyebab konflik antara Islam mainstream dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur bermula dari aspek teologis. Kemudian berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, eksklusivitas tidak ada tokoh pemersatu dari kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki peran otoritas dalam melakukan kontrol atas berbagai fraksi yang ada untuk tujuan memelihara suasana harmonis.¹⁶ Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam upaya mengatasi konflik umat beragama di Kabupaten Nganjuk, seperti SKB (Surat Keputusan Bersama), pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan Peraturan-peraturan kepala daerah. Berhubungan dengan keluarnya kebijakan dan peraturan tersebut, posisi pemerintah Kabupaten Nganjuk memang sudah memerankan fungsinya, meskipun kebijakan dan peraturan yang telah diambil itu tidak memuaskan semua pihak.¹⁷

¹⁵ Di Provinsi ini, eskalasi konflik dengan isu Sunni-Syiah semakin tahun mengalami peningkatan dan resistensi terhadap ajaran syiah semakin menguat dan meluas di tengah masyarakat.

¹⁶ Thomas R. Dye, *Politics in States and Communities* (New Jersey: Prentice Hall. Inc.,1988), 1. dalam Asep Saeful Muhtadi. *Radikalisme Agama: Tinjauan Sosial Politik* Makalah disampaikan dalam diskusi dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 11 April 2012.

¹⁷ Ratusan personel Banser dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor NU dari Kabupaten Nganjuk mendatangi acara pengajian bertajuk indahnya berdakwah yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Islamic Center Jalan KH Agus Salim Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (7/5/2017). Mereka meminta agar kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai meresahkan masyarakat. Pasalnya acara yang digelar HTI sudah mendapat penolakan dari

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah aktivitas keseharian keagamaan Ormas Islam di Kabupaten Nganjuk, potensi munculnya konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk, masih ada ormas Islam yang mengakui dirinya paling benar (*truth claim*: klaim kebenaran) atas nama agama terutama di Kabupaten Nganjuk, butuh pendampingan dalam mencari solusi atas terjadinya konflik keagamaan, kendala yang dihadapi dalam menyatukan persepsi tentang keberadaan Islam Nusantara di Kabupaten Nganjuk, potensi konflik keagamaan di kota Nganjuk belum tergal dengan maksimal, penerapan sistem pengendalian internal pada praktek ibadah di Kabupaten Nganjuk dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan resolusi konflik keagamaan Kabupaten Nganjuk

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti hanya memberikan batasan pada tiga hal agar lebih fokus dalam melakukan penelitian. Tiga batasan masalah tersebut adalah minimnya kesadaran ormas Islam terhadap pentingnya menjaga sikap toleran, pemahaman tentang Islam Nusantara dalam bingkai praktek ibadah di Kabupaten Nganjuk dan bagaimana interaksi antara ormas Islam garis keras dengan ormas Islam yang toleran di Kabupaten Nganjuk

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas keseharian keagamaan Ormas Islam di Kabupaten Nganjuk
2. Potensi munculnya konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk
3. Masih ada ormas Islam yang mengakui dirinya paling benar (*truth claim*: klaim kebenaran) atas nama agama terutama di Kabupaten Nganjuk
4. Butuh pendampingan dalam mencari solusi atas terjadinya konflik keagamaan
5. Kendala yang dihadapi dalam menyatukan persepsi tentang keberadaan Islam Nusantara di Kabupaten Nganjuk

sejumlah Ormas di Kabupaten Nganjuk. Karena ideologi khilafah tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia.

6. Potensi konflik keagamaan di kota Nganjuk belum tergal dengan maksimal
7. Penerapan sistem pengendalian internal pada praktek ibadah di Kabupaten Nganjuk
8. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan resolusi konflik keagamaan Kabupaten Nganjuk

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti hanya memberikan batasan pada tiga hal agar lebih fokus dalam melakukan penelitian. Tiga batasan masalah tersebut adalah minimnya kesadaran ormas Islam terhadap pentingnya menjaga sikap toleran, pemahaman tentang Islam Nusantara dalam bingkai praktek ibadah di Kabupaten Nganjuk dan bagaimana interaksi antara ormas Islam garis keras dengan ormas Islam yang toleran di Kabupaten Nganjuk.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-fenomenologis. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai. Dengan kata lain, karakteristik umum penelitian kualitatif adalah lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.¹⁸

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah dan foto. Neuman, yang dikutip oleh Somantri menyebutkan, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi beragam peristiwa, rekaman dari ucapan, *gestures* dari objek, tingkah laku, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai bentuk visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial.¹⁹

Unit analisis yang dijadikan subyek penelitian adalah kelompok Ormas Islam garis keras dan Ormas Islam yang toleran di Kabupaten Nganjuk, baik dari sumber internal atau eksternal. Sumber internal

¹⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 5

¹⁹ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara*, Vol. 9, No.2 (Desember, 2005), 60.

melalui kelompok HTI, LDII, Jama'ah Tabligh, muhammadiyah dan NU, baik dari tokoh-tokoh Ormas Islam tersebut seperti kyai serta dari pimpinan kelompok Ormas Islam itu sendiri. Adapun dari sumber eksternal meliputi; Ketua MUI Nganjuk, Ketua NU Nganjuk, tokoh Muhammadiyah Nganjuk, tokoh LDII Kertosono, tokoh HTI Nganjuk, Kemenag Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian sumber data primer penelitian ini adalah: (1). Para pimpinan Ormas Keagamaan (Ketua PC Nahdlatul 'Ulama, Ketua PC Muhammadiyah, Ketua PC HTI, Ketua PC Jama'ah Tabligh dan Ketua PC LDII Kabupaten Nganjuk); (2) Sejumlah Warga; (3). Serta sejumlah tokoh masyarakat sekitar Kabupaten Nganjuk. Sedangkan sumber sekondernya adalah data-data dari hasil observasi dan dokumentasi penelitian, seperti tulisan-tulisan yang telah ada berupa buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari, yaitu; (1). Reduksi data (pemilihan data sesuai tema) yaitu data yang terkumpul dalam proses penelitian tersebut dipilah-pilah kembali untuk kemudian difokuskan sesuai dengan tema dan focus penelitian; (2). Display data (penyajian data) yaitu data yang telah dipilah sebelumnya tersebut kemudian disusun dan paparkan dalam bentuk deskriptif naratif; serta (3). Penarikan kesimpulan/ verifikasi yaitu data setelah dipaparkan kemudian analisa untuk diambil kesimpulan akhirnya sehingga akan memunculkan suatu analisa terhadap inti temuan penelitian yang tentunya berkaitan dengan implementasi Ormas Islam di Kabupaten Nganjuk.²⁰

D. Pembahasan

1. Konflik Keagamaan di Kabupaten Nganjuk

Persoalan konflik berlatar belakang agama atau konflik Ormas Islam di Kabupaten Nganjuk harus segera diselesaikan. Penyelesaian konflik agama ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan juga agar persolan ini tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Beberapa langkah dan strategi harus dilakukan secara bersama-sama semua pihak untuk menciptakan

²⁰ Miles dan Huberman. *Qualitatif Data Analysis*. Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah). *Analisi Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

jalan keluar yang mengedepankan terpenuhinya dan terjaminnya HAM para korban. Strategi tersebut dimaksudkan agar tercapainya keadilan transisi.²¹

Dalam hal konflik antara Islam *mainstream* dengan HTI, pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengeluarkan kebijakan peraturan-peraturan berupa SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri Tahun 2008 dan Pergub (Pergub) Tahun 2011 guna mencegah konflik yang lebih besar. Peraturan yang telah dikeluarkan ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Nganjuk sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan respons mereka terhadap isu-isu yang memicu konflik keagamaan dalam bentuk aksi damai, baik berupa protes maupun upaya-upaya yang memberi kontribusi pada penyelesaian konflik keagamaan yang terjadi. Persoalannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat tetap menjadikan aksi damai sebagai opsi utama mereka dalam merespons berbagai isu konflik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Studi ini juga memperlihatkan temuan menarik menyangkut perkembangan konflik keagamaan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.²²

Langkah-langkah tersebut meliputi aspek upaya pengungkapan kebenaran dan penggunaan instrument negara untuk penanggulangan konflik sosial yang terjadi karena adanya pelanggaran KBB di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

a. Pengungkapan Kebenaran

Terjadinya konflik terbuka atas nama agama dan keyakinan di Kabupaten Nganjuk yang berakibat terjadinya pelanggaran HAM membutuhkan upaya pengungkapan kebenaran. Inisiatif pengungkapan kebenaran ini dibutuhkan untuk membuka jalan keluar dan sebagai upaya refleksi di kemudian hari. Pengungkapan kebenaran diperuntukan untuk mengetahui penyebab dan motif terjadi konflik atas nama agama, kapan dan dimana terjadi, siapa sebagai pelaku, siapa yang menjadi

²¹ Keadilan transisi adalah kebenaran yang didasarkan adanya pencarian kebenaran dan adanya ruang rekonsiliasi semua pihak.

²² Jumlah insiden kekerasan sebanyak 35,4%, didominasi oleh orang/ kelompok orang tidak dikenal. Adapun kelompok keagamaan terlihat mendominasi 10,6% insiden kekerasan keagamaan. Sisanya, pelaku kekerasan melibatkan kelompok pemuda/ perguruan pencak silat (2,6%), kelompok kemasyarakatan (2,2%), aparat keamanan (1,1%) dan kader partai politik (0,4%). Hasil observasi dan dokumentasi FKUB Kabupaen Nganjuk tahun 2018.

korban, dan dimana posisi kabupaten Nganjuk dalam kasus tersebut aktif melakukan pelanggaran (*by comission*) atau sengaja melakukan pembiaran (*by omission*).

Pengungkapan kebenaran ini menjadi penting dalam upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi. Misal dalam kasus konflik HTI dan NU (Banser) di Kabupaten Nganjuk sampai dengan saat ini belum ada pengungkapan kebenaran atas motif. Motif terjadinya konflik masih ambigu beberapa data lapangan menunjukkan ada beberapa alasan kenapa konflik HTI Kabupaten Nganjuk terjadi, misalnya dalam HTI Kabupaten Nganjuk ini, beberapa analisis yang menjelaskan akar-akar konflik. *Pertama*, disebabkan adanya pernyataan-pernyataan tokoh agama yang menyebabkan intoleransi dan kebencian ini, merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Nganjuk, yang diperkuat oleh MUI Jawa Timur yang menyebutkan bahwa ajaran Syiah adalah sesat.²³ *Kedua*, sebagian orang berpandangan bahwa HTI Kabupaten Nganjuk terjadi karena adanya kebijakan pemerintah tentang RUU Ormas Islam. Pengungkapan kebenaran ini perlu dilakukan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi *double burden* (beban ganda) yang dialami oleh korban.

b. Proses Peradilan yang Independen dan Tidak Memihak

Setelah terjadinya konflik atas nama agama dan keyakinan yang mengakibatkan timbulnya korban dan pelanggaran HAM diperlukan proses peradilan yang independen dan tidak memihak. Proses peradilan ini diperuntukan untuk menghadirkan kebenaran berdasarkan obyektifitas peradilan yang dilakukan oleh hakim. Proses peradilan ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran main hakim sendiri.

Satu hal penting dan harus dikedepankan dalam proses peradilan ini adalah menghadirkan peradilan yang benar-benar independen dan tidak memihak, harus imparisial. Peradilan yang dilakukan harus tunduk dan patuh pada ketentuan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka dan atau terdakwa dengan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi

²³ Tempo.com, "forum umat: Fatwa Sesat Syiah oleh MUI tidak sah" 31 Agustus 2012 <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/31/078426687/Fotum-Umat-Fatwa-Sesat-Syiah-oleh-MUI-Tidak-Sah>. Diakses pada tanggal 25 November 2018. Pada pukul 09.00 WIB.

dan korban. Harmonisasi regulasi dan kebijakan yang mengatur urusan agama dan keyakinan harus melibatkan masyarakat dan tokoh lintas agama untuk dimaksudkan membangun kerukunan beragama dan berkeyakinan khususnya di Kabupaten Nganjuk.

c. Pengarusutamaan Kesadaran Kolektif Pentingnya Keberagaman

Salah satu penyebab terjadinya konflik atas nama agama dan keyakinan di Kabupaten Nganjuk adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam memandang pentingnya keberagaman dan dominasinya *patron client*. Oleh sebab itu, upaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keberagaman menjadi penting untuk dilakukan pasca terjadinya konflik.

d. Upaya Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Hukum

Beberapa konflik atas nama agama dan keyakinan di Kabupaten Nganjuk terjadi disebabkan adanya regulasi dan kebijakan hukum yang diskriminatif misalnya *pertama*, munculnya regulasi yang diskriminatif berupa SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas HTI Jawa Timur, Pergub No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. *Kedua*, peristiwa konflik horizontal sunni dan Syiah di Kabupaten Nganjuk yang berakibat terusirnya pengikut Syiah ke pengungsian.

Regulasi dan kebijakan hukum tersebut bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan sipil Politik dan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga pasca konflik perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan hukum di level daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Harmonisasi ini penting untuk dilakukan khususnya terhadap pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur keagamaan atau biasa disebut dengan Delik-delik Keagamaan dengan cara melakukan reformulasi dan rekontruksi Delik-Delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI. Delik-delik keagamaan yang subtansinya tendensiun dan *overcriminalized* dalam RUU KUHP Indonesia harus diminimalisir.

e. Penggunaan Kebijakan Penanggulangan Konflik Sosial

Berdasarkan realita penanganan konflik atas nama agama dan keyakinan di Kabupaten Nganjuk masih terfokus pada jalur hukum litigasi semata atau upaya kriminalisasi melalui jalur pemidanaan.

Padahal, jika merujuk pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, dijelaskan bahwa upaya yang penting untuk dilakukan adalah berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, baik dalam tahap rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Berkaitan dengan upaya pascakonflik, pemerintah tidak melakukan langkah-langkah seperti yang telah ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh sebab itu konsolidasi komunal yang melibatkan semua pihak menjadi penting sebagai upaya pemulihan pasca konflik dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi harta yang sangat berharga bagi masyarakat. Karena sebagaimana fakta empiris kasus HTI Kabupaten Nganjuk tidak segera selesai karena adanya pembatasan ruang keterlibatan semua pihak khususnya penduduk asli.

Sumber konflik adalah adanya penafsiran yang berbeda mengenai tafsiran kitab suci atau ajaran agama oleh para pemimpin agamanya. Lebih lanjut, kekerasan agama digolongkan ke dalam tiga tipe. *Pertama*, kekerasan intern agama. Kekerasan ini biasanya terjadi dalam agama tertentu. Para tokoh agama yang ingin melakukan kritik internal (sebagai usaha pembaharuan atau purifikasi) harus berhadapan dengan kelompok yang menghendaki status quo.

Dari sini muncul kecenderungan radikalisme progresif atau radikalisme ortodoks yang berujung pada hubungan kekerasan akibat dari kebuntuan komunikasi dan sikap saling mempertahankan dan menyalahkan pihak lain. *Kedua*, kekerasan muncul ketika agama memandang dirinya berada di tengahnya masyarakat yang zalim. Agama mempunyai tuntutan moral untuk melawan dan memberantasnya. *Ketiga*, kekerasan muncul ketika agama merasa terancam eksistensinya oleh agama-agama lain.

Dalam sejarah, ini merupakan kekerasan yang memilukan. Untuk mengatasi konflik dan memelihara iklim harmoni dengan memberikan ruang demokratik bagi para pemeluk agama dan atau keyakinan apapun. Pemerintah memiliki peran otoritas dalam melakukan kontrol atas berbagai faksi yang ada untuk tujuan memelihara suasana harmonis. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi konflik umat beragama di Indonesia, seperti SKB,

pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan Peraturan-peraturan kepala daerah. Berhubungan dengan keluarnya kebijakan dan peraturan tersebut, posisi pemerintah memang sudah memerankan fungsinya, meskipun kebijakan dan peraturan yang telah diambil itu tidak memuaskan semua pihak.

Dalam hal konflik antara Islam mainstream dengan HTI, pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengeluarkan kebijakan peraturan-peraturan berupa SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri Tahun 2008 dan Pergub (Pergub) Tahun 2011 guna mencegah konflik yang lebih besar. Peraturan yang telah dikeluarkan ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Hasil dan Pembahasan Faktor penyebab konflik antara Islam mainstream dengan HTI di kabupaten Nganjuk bermula dari aspek teologis.

Kemudian berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, eksklusivitas, tidak ada tokoh pemersatu dari kedua belah pihak, Jemaat HTI eksklusif dalam beribadah, tuduhan pelanggaran terhadap SKB dan Pergub, ketahanan masyarakat lokal rendah, pengaruh pemberitaan di media massa tentang konflik antara HTI dengan Islam mainstream di daerah lain, dan masyarakat di tataran Jawa Timur, khususnya di kabupaten Nganjuk, tidak ditemukan lembaga adat yang berfungsi menyatukan masyarakatnya, selain agama.

Aspek teologi ialah karena terdapat perbedaan pemahaman ajaran dari keduanya. Islam mainstream menganggap tidak ada lagi kenabian, setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Perbedaan ini timbul karena terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda antar Jemaat HTI dengan Islam mainstream. Hal ini, menurut perspektif teori interaksi simbolik, disebabkan karena telah terjadi perbedaan penafsiran dan pemaknaan simbol kata-kata dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadits. Pemaknaan terhadap satu simbol yang tidak sama terhadap objek yang sama berpotensi menimbulkan konflik.

Perbedaan itu selanjutnya, menurut Herbert Blumer, dikonstruksi ke dalam realitas sosial masing-masing di mana mereka berada dan membentuk doktrin serta pandangan hidup (*way of life*) yang berbeda. Jemaat HTI menganggap doktrin dan pandangan hidupnya yang benar (*truth claim*). Di pihak lain, Islam mainstream menganggap bahwa HTI telah menodai ajaran Islam yang mereka anut selama ini.

Konflik dirancang sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan politis tertentu, terutama oleh calon kepala daerah. Keberadaan Jemaat HTI di kabupaten Nganjuk oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai stigma umat Islam. Isu ini dimanfaatkan oleh partai-partai yang dalam kampanyenya ingin menghilangkan stigma tersebut, dengan tujuan untuk mendapat simpatik dan dukungan suara pemilih di Kabupaten Nganjuk. Di samping itu, konflik dan penyerangan terhadap Jemaat HTI juga sering terjadi pada saat peringatan hari-hari besar Islam, seperti peringatan tahun baru Islam (1 Muharam) dan menjelang bulan puasa Ramadhan. Dari aspek ekonomi, ketika terjadi penyerangan dan perusakan tidak jarang terjadi penjarahan harta milik warga HTI. Tentu saja tujuan penyerangan dan perusakan milik HTI itu bukan untuk menjarah, tetapi sering kali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu guna kepentingan pribadi dalam situasi konflik.

Perusakan juga terjadi di pertokoan dan peternakan domba milik HTI. Pihak Islam mainstream bertambah semangat 'menggebuk' HTI agar anggaran penanganan masalah Jemaat HTI dari Bupati Nganjuk dapat dikeluarkan. Terjadinya konflik juga disebabkan oleh tuduhan sepihak dari masing-masing kelompok. Pihak Islam mainstream menuduh HTI banyak melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008 dan Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2011, seperti masih melakukan kegiatan ibadah berjamaah dan merekrut anggota baru. Di pihak lain, HTI berketetapan hati bahwa melaksanakan ibadah baik sendiri-sendiri maupun berjamaah merupakan hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Potensi konflik juga terjadi karena adanya pelaksanaan program-program sosial dari HTI seperti pengobatan gratis dan donor darah untuk warga sekitar. Kegiatan sosial ini seringkali menimbulkan ketidaksenangan bagi kelompok Islam mainstream, terutama para elitnya. Mereka menganggap kegiatan itu hanya sebagai 'kedok' saja untuk merekrut anggota baru HTI. Aspek tidak adanya figur pemersatu bagi kedua pihak, juga memicu terjadinya konflik.

Seiring berjalannya waktu, para sesepuh yang dianggap dapat mempersatukan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut banyak yang sudah meninggal dunia. Bila terjadi perselisihan antara kedua kelompok tersebut, tidak ada lagi tokoh yang menengahinya, bahkan memicu ke

arah yang lebih besar. Sedangkan keturunan-keturunan dari kedua belah pihak, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya semakin memudar. Aspek eksklusivitas pihak HTI dalam menjalankan ibadah juga memicu terjadinya konflik. Pihak HTI tidak mau berbaur dengan Islam mainstream dalam hal beribadah, seperti shalat.

2. Pemahaman Terhadap Islam Nusantara di Kabupaten Nganjuk

Setiap agama selalu membawa misi kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan. Di dalam terminologi Al-Qur'an, misi suci ini disebut rahmah lil alamin (rahmat dan kedamaian bagi alam semesta). Namun dalam tataran historisnya misi agama tidak selalu artikulatif. Selain sebagai alat pemersatu sosial, agamapun menjadi unsur konflik tulisan Afif Muhammad dijelaskan bahwa, "agama acap kali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda". Hal ini sama dengan pendapat Johan Efendi yang menyatakan "Bahwa agama pada suatu waktu memproklamkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan. Namun, pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik. Bahkan tidak jarang dicatat dalam sejarah menimbulkan peperangan. Konflik sosial yang berbau agama bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

a. Adanya Klaim Kebenaran (*Truth Claim*)

Setiap agama punya kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu- satunya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakinkannya. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai- nilai suci itu.

Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep- konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka. Armahedi Mazhar menyebutkan bahwa absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah penyakit- penyakit yang biasanya menghinggap

aktivis gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik.

Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah "dakiah". Dakiah merupakan upaya mensosialisasikan (mengajak, merayu) ajaran agama. Bahkan tidak menutup kemungkinan, masing-masing agama akan menjustifikasi bahwa agamalah yang paling benar. Jika kepentingan ini lebih diutamakan, masing-masing agama akan berhadapan dalam menegakkan hak kebenarannya. Ini akan memunculkan sentimen agama, sehingga benturan pun sulit dihindari. Fenomena yang seperti inilah yang dapat melahirkan konflik antar agama. Misalnya, peristiwa Perang Salib antara umat Islam dan umat Kristen. Tragedi ini sangat kuat muatan agamanya, dari pada politisnya.

b. Adanya Pengkaburan Persepsi antar Wilayah Agama dan Suku

Mayoritas rakyat Indonesia lebih mensejajarkan persoalan agama dengan suku dan ras. Pemahaman yang kabur ini bisa menimbulkan kerawanan atau kepekaan yang sangat tinggi, sehingga muncul benih-benih sektarianisme. Seperti dalam kasus Dr. AM Saefuddin, yakni Menteri Negara Pangan dan Holtikultura pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Menteri itu telah melecehkan salah satu agama, dalam pernyataannya "Megawati Pindah Agama menjadi Agama Hindu". Hal ini dikarenakan dia telah menyaksikan seseorang yang beragama Islam (Megawati) ikut melakukan kegiatan ritual pada agama Hindu di Bali. Akibatnya, setelah pernyataan itu dilontarkan terjadi sejumlah demonstrasi, bahkan berubah menjadi kerusuhan.

c. Adanya Doktrin Jihad dan Kurangnya Sikap Toleran dalam Kehidupan Beragama

Seorang agamawan sering kali mencela sikap sempit dan tidak toleran pada orang lain yang ingin menganiayanya, pada hal disisi lain mereka sendiri mempertahankan hak dengan cara memaksa dan

menyerang orang yang mereka anggap menyimpang. Bahkan, mereka menganggap membunuh orang yang menyimpang itu sebagai kewajiban (Jihad). Jika berada dalam agama ketiga, diluar kedua agama yang sedang bertikai, kita akan tersenyum mengejeknya, karena mereka saling menghancurkan, yang dalam persepsi kita bahwa agama yang bertikai tersebut sama-sama palsu. Tetapi lain lagi ceritanya, jika yang perang adalah agama kita dengan agama lainnya. Dengan sendirinya, perang itu akan menjadi sebuah perjuangan untuk melawan dan menghancurkan kepalsuan. Bahkan kita akan meyakini adanya unsur kesucian dalam perang itu, sehingga mati di dalamnya di anggap kehormatan yang besar sebagai syahid / martir.

Hanya saja kita harus paham bahwa mereka yang ada dipihak lawan agama kita juga berpendapat sama seperti itu, dan mereka yang berada dipihak ke tiga (tidak berperang), dan memandang perang kita sebagai usaha saling menghancurkan antara dia kepalsuan. Semua orang di dunia ini sepakat bahwa agama selalu mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika seseorang semakin yakin dengan agamanya, maka "orang baik" itu justru semakin kuat membenarkan dirinya untuk tidak toleran kapada orang lain, bahkan mereka berhak mengejar-ngejar orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Jadi, merekalah yang sebenarnya menjadi sumber kebenaran.

d. Minimnya Pemahaman terhadap Ideologi Pluralisme

Al-Qur'an (QS.2:148) mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima keragaman budaya dan agama dengan memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang anti plural dan suka kekerasan itu sangatlah tidak beralasan.

Pluralisme telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau berada di Madinah, masyarakat non-Muslim tidak pernah dipaksa untuk mengikuti agamanya. Bahkan dalam perjanjian dengan penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan. Salah satunya Orang Yahudi yang turut dalam perjanjian dengan kami berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan; tidak

akan diperlukan zalim. Jika di antara mereka berbuat zalim, itu hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya.

Bukti-bukti empiris pluralisme Islam juga terjadi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik yang konkrit di Andalusia, Spanyol, pada masa pemerintahan Khalifah Umawi. Kedatangan Islam di daerah tersebut telah mengakhiri politik monoreligi secara paksa oleh penguasa sebelumnya. Pemerintah Islam yang kemudian berkuasa selama 500 tahun telah menciptakan masyarakat Spanyol yang pluralistic, sebab ada tiga agama di dalamnya yang berkembang, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Mereka dapat hidup saling berdampingan dan rukun. Potret seperti inilah yang perlu dikembangkan oleh seluruh agama, sehingga akan mampu menahan diri dari hasrat alami manusia, yakni kehendak untuk berkuasa (*Will to Power*). Selain itu, manusia harus mampu mempelakukan agama sebagai sumber etika dalam berinteraksi, baik di antara sesama penguasa maupun antara penguasa dengan rakyat. Jika etika pluralisme ini dapat ditegakkan, maka tidak akan terjadi rangkaian kerusuhan, pertikaian dan perusakan tempat-tempat ibadah.

3. Harmonisasi Sesama Muslim di Kabupaten Nganjuk

Di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 telah terjadi berbagai konflik antara ormas (organisasi masyarakat) keagamaan Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, ratusan anggota Banser dan GP Anzor, mendatangi acara pengajian umum yang digelar oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Gedung Islamic center, jalan KH Agus Salim Nganjuk. Kedatangan Banser dan Anzor di pengajian umum bertajuk 'Indahnya Berdakwah' yang dihadiri 250 jamaah HTI ini nyaris terjadi kericuhan dan menimbulkan konflik. Karena HTI Nganjuk tetap ngotot melakukan pengajian di Islamic center tersebut, padahal Kegiatan yang dilakukan HTI ini mendapat penolakan dari ormas lain, Karena Ideologi Khalifah HTI tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Akibatnya nyaris terjadi bentrok massal antara HTI dengan Banser.²⁴

²⁴ Gerakan Pemuda Anzor (GP. Anzor) juga Banser akan menghalau bila tablig itu tetap digelar, makanya kita mengamankan jangan sampai ada benturan antar agama. Kasihan warga Nganjuk bila konflik itu terjadi, sehingga harus dicegah," ujar Sokip. Negosiasi berlangsung alot karena, perwakilan HTI, Ustad Muhammad Arifin Badri tetap menginginkan acara itu tetap terlaksana. Tapi GP Anzor Nganjuk dan Pengasuh Ponpes Mojosari Nganjuk menginginkan kegiatan itu dibubarkan.

Menurut Sokip, Korlap dari GP Ansor Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa, pihaknya berharap tidak sampai terjadi konflik antara HTI dengan ormas Islam lainnya. "Kami tidak ingin terjadi benturan dan berujung konflik nantinya, Sebab bukan hanya di Nganjuk saja, akan tetapi di daerah lainnya juga ditolak kegiatan sejenis ini. Dijelaskan oleh sokip, dalam undang-undang, kegiatan seperti yang dilakukan oleh HTI semacam itu harus ada penanggung jawabnya. Namun dari ormas HTI tidak mampu memberikan. *"Sehingga Banser berkewajiban untuk melakukan pelarangan agar konflik tidak terjadi,"* jelasnya. Banser dan GP Ansor akan menghalau bila tabligh itu tetap digelar, guna mengamankan agar tidak sampai ada benturan dengan ormas lain atau terlebih antar agama.²⁵

Dalam surat al-Hujurat ayat 10, Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, oleh sebab itu sesama muslim harus pandai-pandai memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam surat di atas Allah memerintahkan untuk melakukan *ishlah* (perbaikan hubungan) jika seandainya terjadi ketidak sepahaman antara dua orang individu maupun kelompok umat Islam. Maka dalam rangka mengembangkan sikap toleransi, dapat dimulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan seorang muslim dalam mengelola dan mensikapi perbedaan yang terjadi pada saudara kita sesama muslim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. Kabupaten Nganjuk merupakan kota berkumpulnya berbagai macam etnis dan ormas.

Di dalamnya terdapat berbagai ormas Islam yang hidup dengan rukun antar pengikutnya. Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi terbesar yang mempunyai warga yang mayoritas di Kabupaten Nganjuk. Selain itu ada Muhammadiyah, FPI, HTI dan *Jam'iyah Tabligh* (JT). Pluralitas ormas yang ada di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik. Mereka hidup saling menghormati dan melengkapi, bahkan beberapa kali para pengurus antar ormas tersebut mengadakan pertemuan keakraban dan persaudaraan dalam sebuah wadah organisasi Majelis Silaturahmi

²⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 20 April 2018, pukul 19.00 WIB. Di Kantor GP Ansor Kabupaten Nganjuk.

Umat Islam Kabupaten Nganjuk. Kaum muslimin Kabupaten Nganjuk termasuk kelompok egaliter atau menerima dengan baik pemikiran dan keberadaan pendatang baru sesama muslim. Bahkan ini sudah terjadi awal kedatangan Islam di Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa melalui pendatang ini Islam menyebar di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

Bahkan masjid yang berada di tengah-tengah kota Kabupaten Nganjuk dinamakan dengan masjid Baiturrahman. Fakta lain yang tidak terbantahkan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk adalah mereka menerima dan mempersilahkan para pendatang untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam masyarakat. Mereka mempersilahkan para pendatang yang ingin berkhidmat dan memberikan pencerahan-pencerahan di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Di antara posisi-posisi strategis dalam masyarakat adalah seperti posisi sebagai ketua NU, pengurus Masjid Jami', sebagai Kyai di pondok pesantren dan lain-lain. Kedua, PCNU Kabupaten Nganjuk diketuai kepada H. Sholahuddin Fatawi yang berasal dari Gresik Namun telah menetap lama di Kabupaten Nganjuk. Rois Syuriah MWC NU Kabupaten Nganjuk diserahkan kepada H. Ahmad Atabik yang berasal dari Pati. Ketua Ta'mir masjid Jami' Kabupaten Nganjuk diemban oleh H. Abdul Muid yang berasal dari Pamotan. Sikap masyarakat Kabupaten Nganjuk mempersilahkan kepada para pendatang untuk turut serta membangun dan menduduki posisi strategis dalam masyarakat pernah juga dipraktikkan oleh kaum Anshor (penduduk Madinah) kepada para pendatang (kaum muhajirin Makkah). Kaum Anshor memberikan fasilitas-fasilitas dan posisi-posisi strategis kepada kaum Muhajirin dalam membangun negara Madinah. Hal ini terekam dalam al-Qur'an QS. al-Hasyr: 9:

Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang

beruntung."

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk kota madinah lebih menghormati kaum pendatang. Terlepas dari apa yang melatarbelakangi sifat dan keyakinan masing-masing. Kalaupun ada perbedaan yang signifikan, maka tidak akan dipermasalahkan. Begitu juga *tuth claim* (klaim kebenaran) yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, memang persoalan khilafiyah selalu menjadi persoalan yang tiada ujungnya. Namun, tugas pemangku kebijakan yaitu Ormas/ pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang harmoni itu yang menjadi tolak ukur. Karena, harus disadari bahwa keberagaman masyarakat Kabupaten Nganjuk itu sangat kompleks dan bervariasi.

E. Kesimpulan

Di Kabupaten Nganjuk terdapat berbagai ormas Islam yang hidup dengan rukun antar pengikutnya. Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi terbesar yang mempunyai warga yang mayoritas di Kabupaten Nganjuk. Selain itu ada Muhammadiyah, FPI, HTI dan *Jam'iyah Tabligh* (JT). Pluralitas ormas yang ada di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik. Mereka hidup saling menghormati dan melengkapi, bahkan beberapa kali para pengurus antar ormas tersebut mengadakan pertemuan keakraban dan persaudaraan dalam sebuah wadah organisasi Majelis Silaturahmi Umat Islam Kabupaten Nganjuk. Kaum muslimin Kabupaten Nganjuk termasuk kelompok egaliter atau menerima dengan baik pemikiran dan keberadaan pendatang baru sesama muslim. Bahkan ini sudah terjadi awal kedatangan Islam di Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa melalui pendatang ini Islam menyebar di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

Potensi konflik juga terjadi karena adanya pelaksanaan program-program sosial dari HTI seperti pengobatan gratis dan donor darah untuk warga sekitar. Kegiatan sosial ini seringkali menimbulkan ketidaksenangan bagi kelompok Islam masinstream, terutama para elitnya. Mereka menganggap kegiatan itu hanya sebagai 'kedok' saja untuk merekrut anggota baru HTI. Aspek tidak adanya figur pemersatu bagi kedua pihak, juga memicu terjadinya konflik. Seiring berjalannya waktu, para sesepuh yang dianggap dapat mempersatukan kelompok-

kelompok yang bertikai tersebut banyak yang sudah meninggal dunia. Bila terjadi perselisihan antara kedua kelompok tersebut, tidak ada lagi tokoh yang menengahinya, bahkan memicu ke arah yang lebih besar. Sedangkan keturunan-keturunan dari kedua belah pihak, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya semakin memudar. Aspek eksklusivitas pihak HTI dalam menjalankan ibadah juga memicu terjadinya konflik. Pihak HTI tidak mau berbaur dengan Islam mainstream dalam hal beribadah, seperti shalat.

Akar permasalahan konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk yang dapat diidentifikasi adalah *pertama*, aktivitas keseharian keagamaan Ormas Islam di Kabupaten Nganjuk. Kemudian, potensi munculnya konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk. *Kedua*, Masih ada ormas Islam yang mengakui dirinya paling benar (*truth claim*: klaim kebenaran) atas nama agama terutama di Kabupaten Nganjuk, butuh pendampingan dalam mencari solusi atas terjadinya konflik keagamaan. *Ketiga*, kendala yang dihadapi dalam menyatukan persepsi tentang keberadaan Islam Nusantara di Kabupaten Nganjuk. Kemudian, potensi konflik keagamaan di kota Nganjuk belum tergal dengan maksimal dan penerapan sistem pengendalian internal pada praktek ibadah di Kabupaten Nganjuk serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan resolusi konflik keagamaan Kabupaten Nganjuk.

F. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amrullah, Ahmad. 1985. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PLP2M,
- Azra, Azyumardi, untuk Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1992 berjudul "The Transmissiono Islamic Reformism to Indonesia: New York of Middle Eastern and Malay-Indonesia berjudul *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-akar Pembaharuan Pembaruan Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung, 1994.
- _____, 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan.
- Bactiar, Wardi, *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Person*. Bandung:

- Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fauzan, Saleh, 2001. *modern Trends in Islamic Theological Discourse in Twentieth Century Indonesia: A Critical Survey* Leiden, Boston, Koln: Brill.
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Huberman, Miles, 1992. *Qualitatif Data Analysis*. Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah). *Analisi Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- _____, 1989. "Islam di Asia Tenggara: Pengantar Pemikiran," dalam Azyumardi Azra (peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Husni, Rahim. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam: Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- J. Moleong, Lexy, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja,
- Khisbiyah, Yayah. 2000. *Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan*. Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah. Yogyakarta: The Asia Foundation bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo. 1993. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung : Mizan.
- Panggabean, S. Rizal, 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Asia Foundation.
- Rahardjo, Shodiq. *Konflik Antara NU dan Muhammadiyah di Wonokromo Pleret Bantul (1960-2002)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. : tidak diterbitkan
- Rozaki, Abdur, 2004. *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal* , Flamma, Vol. 24.
- Omar, Faruk, 1993. "Muslim Asia Tenggara dari Sejarah menuju Kebangkitan Islam", dalam Saiful Muzani, (ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Sartono, Kartodirdjo, 1992. *Pengantar Indonesia Baru, 1500-1900: dari Emporium sampai Imperium, Jilid I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Streenbrink, Karel A., 1995. *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, terj. Suryana A. Jamrah. Bandung: Mizan.

- Yakin, Haqqul, 2009. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: elSAQ Press. Cetakan pertama Agustus.
- W. Arnold, Thomas, *The Preaching of Islam* (Low Price Publication, Delhi, 1995), Buku ini pertamakali diterbitkan pada tahun 1913.